

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi saat ini sangat pesat, maka dari itu teknologi merambah hampir ke setiap aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi digital dalam setiap segi kehidupan menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Salah satunya yang banyak diterapkan dari segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu pemerintahan berbasis digital, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk dapat membangun kota pintar sehingga pelayanan yang didapatkan masyarakat jauh lebih baik (Arjita, 2017).

Dengan berkembangnya teknologi seperti internet di dalam kehidupan masyarakat, maka hal tersebut memberikan kemudahan agar mendapatkan informasi secara cepat dan tepat (Widodo, 2016) . Pada saat ini juga teknologi telah dimanfaatkan dalam segala bidang baik untuk bisnis, kesehatan, pemerintahan, maupun pendidikan. Teknologi yang saat ini semakin maju membuat banyak kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan internet, seperti dalam berbisnis saat ini masyarakat menggunakan *e-commerce*, pendidikan, kesehatan, dan juga pemerintah menggunakan *e-government* dan banyak lagi kegiatan yang berbasis elektronik (Ramdani, 2018).

Untuk pemerintahan yang berbasis digital atau *e-government* merupakan salah satu langkah yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah setempat untuk dapat membuat setiap kebijakan yang akan dikeluarkan menjadi lebih terbuka dan

dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan secara digital menyimpan seluruh kebijakan dan anggaran di dalam suatu *website* maupun aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum secara terbuka.

Salah satu pilihan lain bagi pemerintah untuk membentuk *e-government* adalah dengan hadirnya media sosial. Jumlah orang yang menggunakan media sosial sangat tinggi dan penggunaannya secara luas. Data info dari Indonesia.id menunjukkan akan ada 167 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2023. Sekitar 60,4% populasi negara terwakili oleh kumpulan data ini. Basis pengguna yang sangat besar ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang kuat mengenai dasar-dasar TI.

Gambar 1. 1 Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia
(2015-2023)



Sumber: We are Social

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Ketiga tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pemajuan *Electronic Government* yang dikeluarkan pada tahun 2003. Agar *e-government* dapat terwujud secara utuh sebagai suatu sistem, terlebih dahulu harus melalui empat tahap: persiapan, pendewasaan, konsolidasi, dan penggunaan. Suatu pemerintah yang sukses dalam menyelenggarakan *e-government* dapat dilihat dari bagaimana peran aktif masyarakat setempat terhadap keterlibatan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah (Pratiwi, 2020) Dengan bertambahnya profil media sosial di situs resmi e-Government, terlihat jelas bahwa lembaga pemerintah di Indonesia secara bertahap mulai menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi publik.

Selain memiliki manfaat untuk dapat lebih melibatkan masyarakat dalam kebijakan yang dikeluarkan, penggunaan *e-government* juga dapat dijadikan kontrol sosial oleh masyarakat saat kebijakan tersebut sudah dijalankan. Perubahan yang terjadi saat ini mengharuskan pemerintah untuk memenuhi tuntutan seperti transparansi sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi. Pemerintah juga harus menanggapi tuntutan secara efisien guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan. Salah satu fungsi pemerintah adalah untuk memastikan bahwa warganya memiliki akses layanan yang diperlukan, untuk dapat menjalankan fungsi tersebut pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Langkah awal menuju *good governance* di Indonesia adalah pelayanan publik (Nurita, 2016).

Good governance mengacu pada praktik menjalankan pemerintahan secara jujur dan terbuka. Memiliki pemerintahan yang efisien dan kompeten sangat penting bagi setiap masyarakat yang sedang berkembang diperlukan agar menggabungkan beberapa faktor di antaranya pemerintah, *privat sector*, dan *civil society* untuk dapat mengelola sumber daya alam, ekonomi, serta lingkungan dan juga social (Handayani & Nur, 2019). Selain itu, perspektif pemerintah terhadap tugasnya juga memainkan peran penting dalam mencapai tata kelola yang efektif (Barnes, 2008). *Good governance* juga sebagai suatu bentuk penyelesaian masalah-masalah kenegaraan.

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini mampu memberikan manfaat bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dengan cepat dan akurat, mengelola data tersebut, dan menyebarkan informasi. *Electronic government* juga digunakan sebagai alat untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah, oleh karena itu dapat dicapai pemerintahan yang efisiensi, efektivitas, transparansi dan pemerintah dapat bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat (Akbar & Sensuse, 2018). Dengan adanya kemajuan dalam bidang informasi dan teknologi tidak hanya perusahaan saja yang berkembang tetapi birokrasi pun mengalami perkembangan. Dari hal tersebut munculah pemikiran tentang tata kelola dimasyarakat yang berada di kota lebih siap daripada masyarakat yang berada di desa, maka muncul ide mengenai *smart city* (Utomo & Hariadi, 2016). Ide tersebut muncul untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dan pelayanan yang ada di kota, tujuannya untuk dapat mencapai kondisi sosial

ekonomi yang baik, serta dapat membuat daya tarik dan daya saing meningkat (Faidat & Khozin, 2018).

Salah satu peran pemerintah adalah membuat catatan publik mudah diakses. Kewajiban ini muncul sebagai akibat nyata dari bagaimana negara dan pemerintahan dijalankan. Dengan menyediakan catatan dan informasi publik sebagai tanggapan terhadap permintaan masyarakat, tujuan mendasar dari keterbukaan informasi publik adalah untuk menjadikan lembaga pemerintah lebih transparan dan bertanggung jawab. Akses terhadap informasi merupakan hal mendasar bagi pertumbuhan setiap individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hak untuk mengetahui merupakan hal yang mendasar.

Selain itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang unggul, penting bagi negara demokratis yang menghormati kedaulatan warga negaranya untuk menyediakan informasi publik kepada publik. Pejabat pemerintah menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Khusus untuk akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki badan publik, UU KIP memberikan jaminan kepastian. Badan publik wajib menyebarkan informasi publik dan dalam pertemuan terbuka mengkomunikasikan kebijakan pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a. Hal ini menunjukkan bahwa entitas publik tidak boleh lagi menyembunyikan atau menyembunyikan informasi apa pun dari publik (selain jenis data tertentu yang bersifat rahasia atau data yang dikecualikan).

Ketika tidak ada lagi “hambatan” yang membuat masyarakat tidak mengetahui apa yang telah dilakukan penyedia layanan publik, khususnya terkait standar operasional, maka akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik dapat terwujud. Berdasarkan situs Ombudsman, tidak semua badan publik menyadari betapa pentingnya memberikan informasi kepada masyarakat. Akibatnya, Ombudsman terus menerima laporan informasi masyarakat dengan berbagai dugaan maladministrasi, seperti kegagalan memberikan layanan, penundaan yang lama, dan perlakuan diskriminatif akibat minimnya informasi layanan. Hal ini membuat masyarakat sulit mengakses layanan.

Selain UU KIP, pemerintah juga berupaya mempercepat reformasi birokrasi yang menjadi payung perubahan tata kelola pemerintahan dengan mengatur publikasi informasi publik. Sistem, proses, dan prosedur kerja pada seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah, dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan sesuai standar yang ditetapkan oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diharapkan dapat mengarah pada integrasi nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi, yaitu mempercepat proses tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh lembaga dan kementerian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Setiap penyedia layanan publik akan merasakan dampak baik secara internal maupun eksternal dari penyebaran informasi publik. Kemungkinan

pejabat di instansi terkait menyalahgunakan kekuasaan publiknya dapat dikurangi, dan pada akhirnya dihilangkan, dengan adanya keterbukaan informasi. Selain itu, dengan tersedianya semua informasi untuk umum, karyawan akan sadar akan kesehatan organisasi secara keseluruhan, yang akan mengarah pada pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang lebih baik. Selain itu, transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan seluruh tugas organisasi, menghemat waktu dan uang. Sebagai konsekuensinya, lembaga-lembaga akan termotivasi untuk mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Keterbukaan dan transparansi dalam pembagian informasi dapat meningkatkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan masyarakat umum, yang pada gilirannya mendorong lebih banyak keterlibatan kelompok-kelompok tersebut dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui mengenai kebijakan dan pengelolaan suatu badan publik, serta lembaga pemerintah mana pun, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Era keterbukaan informasi di zaman modern ini mempunyai banyak dampak positif, namun juga banyak dampak buruknya.

Dari proses pembentukannya terlihat jelas bahwa warga mendorong UU KIP dengan alasan seperti upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan memiliki pers yang berkualitas. Dampak negatif keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menyoroiti perlunya segera dilaksanakannya

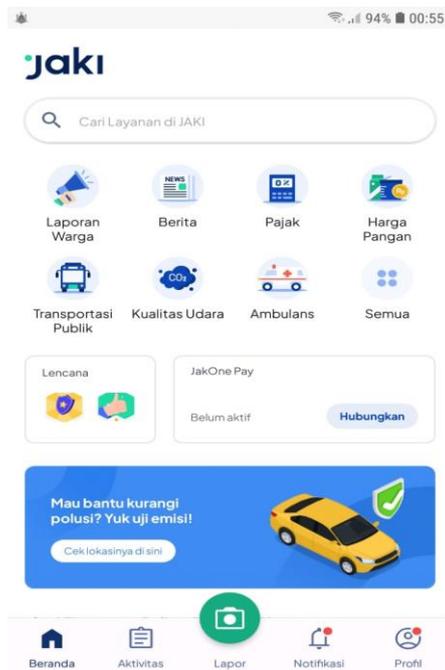
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola memerlukan transparansi informasi. Karena kemampuan untuk mengakses catatan publik merupakan hak asasi manusia yang mendasar, pemerintah yang baik harus memastikan bahwa rakyatnya dapat mengaksesnya tanpa campur tangan.

Setelah melihat dampak yang terjadi, maka pemerintah khususnya Pemprov DKI Jakarta memunculkan sebuah strategi ataupun ide yang dikeluarkan untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada DKI Jakarta termasuk keterbukaan informasi bagi masyarakat. Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan suatu aplikasi yang mana aplikasi tersebut dapat diakses melalui *smartphone* yang bernama “Jakarta Kini” atau (JAKI), Pelayanan komunikasi, informatika, dan statistik pemerintah provinsi DKI Jakarta diawasi oleh Jakarta *Smart City*, salah satu BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Aplikasi JAKI inilah yang digunakan DKI Jakarta untuk menjalankan *e-government*. Jakarta *Smart City* adalah inisiatif yang disponsori pemerintah dan telah dijalankan sejak tahun 2014, dan aplikasi JAKI merupakan evolusi dari ide tersebut.

Dengan meningkatkan kualitas layanan publik dan menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah, kota pintar dapat membuka jalan bagi tata kelola yang lebih baik. Jakarta *Smart City* mendirikan program aplikasi yang dikenal sebagai JAKI untuk membantu pencapaian tujuannya. Dengan fitur-fitur antara lain Laporan Warga, Kontak Darurat, Ambulans, Pajak, Harga Pangan, Transportasi Publik, Kualitas Udara, Peta, Wifi Gratis, Pantau Banjir, dan

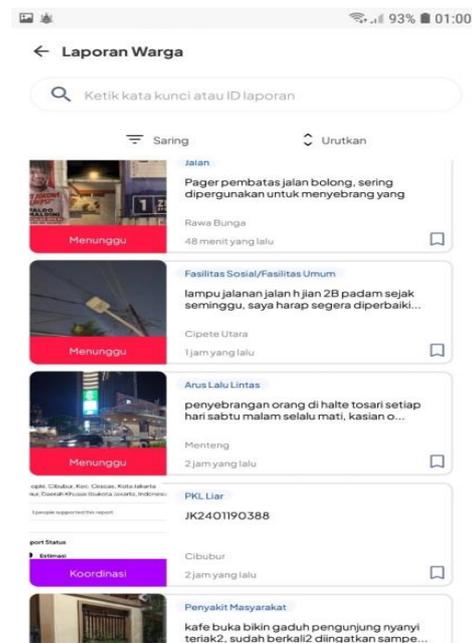
Antrean Faskes, software ini mampu memuaskan keinginan masyarakat akan informasi seputar DKI Jakarta..

Gambar 1. 2 Fitur Aplikasi JAKI



Sumber: Aplikasi JAKI

Gambar 1. 3 Laporan Warga

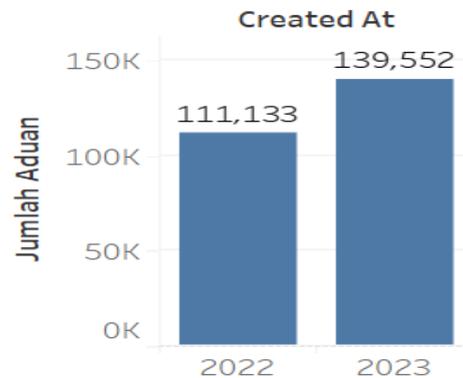


Sumber: Aplikasi JAKI

Berdasarkan gambar yang ada di atas dari beragam fitur di aplikasi JAKI, ada salah satu fitur yang bernama JakRespon yang berisi berbagai macam laporan warga DKI Jakarta, laporan tersebut tidak hanya dilaporkan saja tetapi akan ditindaklanjuti hingga selesai, setiap prosesnya pun akan di *update* di aplikasi JAKI sehingga pelapor mengetahui sejauh mana laporannya ditindak lanjuti. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Jakarta *Smart City* jumlah aduan melalui kanal aplikasi JAKI pada awal tahun 2022 sampai november 2023 ada 250.685 laporan.

Gambar 1. 4 Presentasi Jumlah Aduan

Jumlah Aduan Pertahun di JAKI



Sumber: Jakarta Smart City

Aplikasi JAKI ini dibuat bukan hanya untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tetapi aplikasi JAKI juga merupakan salah satu perwujudan dalam pengembangan *smart city* di DKI Jakarta. Dalam hal pokoknya kota cerdas lebih memafaatkan kemajuan sebuah teknologi untuk dapat memaksimalkan layanan pemerintah berbasis data dan pengambilan keputusan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembuatan kebijakan. Manfaat dari aplikasi JAKI sendiri ini adalah masyarakat jadi bisa ikut untuk berpartisipasi dalam memberikan laporan mengenai perkembangan dan permasalahan yang ada di DKI Jakarta seperti, banjir yang merendam salah satu daerah di Jakarta, lalu lintas yang macet di berbagai titik, jalan yang rusak, fasilitas yang rusak dan lain sebagainya. Laporan yang sudah masuk dari masyarakat untuk pemerintah selanjutnya akan ditindaklanjuti sehingga dapat memberikan perubahan kota yang lebih baik. Hal ini dilakukan agar dapat mengajak atau mendorong masyarakat di

DKI Jakarta untuk dapat ikut serta dalam berpartisipasi aktif dalam melaporkan berbagai permasalahan yang ada disekitar mereka.

Secara eksternal, jika keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, terjaminnya kepastian layanan publik bagi masyarakat, terwujudnya kemudahan layanan bagi masyarakat, sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan publik. Sebegitu pentingnya keterbukaan informasi publik dan harapannya, semua Badan Publik, khususnya instansi penyelenggara pelayanan publik, turut memenuhi amanah UU KIP dengan berpartisipasi secara aktif untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, baik mengenai proses pelayanan, proses tindak lanjut, informasi umum yang bersifat serta merta, maupun komponen standar layanan sebagaimana dimuat dalam UU Pelayanan Publik. Harapannya dapat tercipta instansi penyelenggara yang benar-benar informatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, sebagai pelayanan masyarakat dan abdi negara yang berkontribusi pada percepatan terwujudnya Reformasi Birokrasi di semua sektor pelayanan publik.

Peneliti tertarik membahas implementasi *e-government* dan keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta khususnya aplikasi JAKI. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, peneliti ingin mengetahui apakah aplikasi ini cukup terbuka dalam memberikan informasi terbuka kepada masyarakat dan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. “Penerapan *Electronic Government* dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta

(Studi Kasus Penyediaan Aplikasi Jakarta Kini)” adalah istilah yang dipilih peneliti karena ketertarikan terhadap topik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *electronic government* dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta?
2. Bagaimana manfaat yang diperoleh masyarakat dari penerapan *electronic government* melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini)?
3. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai keterbukaan informasi melalui aplikasi JAKI?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran dari penerapan *Electronic Government* dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta.
2. Menganalisis manfaat yang diperoleh dari penerapan *Electronic Government* melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI)
3. Menganalisis bagaimana persepsi masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI)

1.4 Signifikansi Penelitian

Studi ini mengklasifikasikan signifikansi ke dalam dua kategori, yaitu signifikansi akademik dan relevansi praktis, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini menggunakan 10 (sepuluh) referensi publikasi ilmiah dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *E-Government* dan keterbukaan informasi pada pemberlakuan aplikasi JAKI.

Penelitian ini diawali dengan referensi penelitian yang dilakukan oleh Rumimpunu dkk. (2021) dengan judul Penerapan *E-Government* Dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kota Manado). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterbukaan dan transparansi informasi publik dapat ditingkatkan melalui penggunaan *e-government*. Teknik deskriptif kualitatif digunakan dalam penyelidikan ini. Seorang anggota Dinas Komunikasi dan Informatika Manado berperan sebagai sumber informasi untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengandalkan dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk mengumpulkan datanya. Data primer diambil dari *website* resmi Pemerintah Kota Manado. Selain itu penelitian ini menemukan bahwa 1.) Saat ini masih terdapat kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang informasi dan komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado. 2.) Dana yang saat ini tidak cukup untuk mendukung inisiatif *e-government* dan pengembangan situs web. Ketiga, tidak tersedia cukup data untuk dimasukkan ke dalam situs; keempat, pemerintah tidak sepenuhnya berkomitmen untuk memfasilitasi peluncuran *e-government*. 5.) Wilayah Manado masih kurang

memiliki jaringan fasilitas masyarakat yang komprehensif, 6.) Pemerintah dan masyarakat belum mampu menjalin kontak dua arah melalui *website*, dan 7) *Website* pemerintah Kota Manado belum dipertimbangkan platform kunci untuk kesuksesan dan evaluasi. Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengkaji penggunaan *e-government* dan transparansi informasi; Namun, ketika yang pertama melihat situs resmi kota Manado, lalu penelitian ini memeriksa aplikasi Jakarta Kini.

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya (2018) menjadi acuan kedua yang dikutip dalam penelitian Indah dan Hariyanti ini. Mengkaji seberapa baik Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Tasikmalaya menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi tujuan utama penelitian ini. Adapun yang ikut serta dalam penelitian ini adalah para pelajar, kepala desa, dan anggota Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.

Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti mengamati dan mewawancarai partisipan yang memenuhi kriteria tersebut. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa ada empat hal yang mempengaruhi bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik dipraktikkan. 1.) terdapat komunikasi yang baik antara pengambil kebijakan dan pelaksana, namun komunikasi antara pelaksana dan masyarakat kurang baik. 2.) terdapat permasalahan sumber daya pada informasi publik departemen pelayanan yang tidak ditangani dengan baik, seperti kurangnya personel atau fasilitas yang dapat mendukung pekerjaan petugas. 3.) Sikap petugas memudahkan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan, dan kebijakan keterbukaan informasi publik mempunyai faktor disposisi yang baik. 4.) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kolaborasi antarkantor menjadi kekuatan birokrasi.

Penelitian seperti ini penting karena menambah literatur yang ada mengenai topik transparansi informasi publik; Namun berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai objek kajiannya, sedangkan penelitian-penelitian di atas menggunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tasikmalaya.

Ketiga, Yogiswara dkk. (2014) menggunakan studi kasus situs resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai contoh bagaimana *e-government* dapat mendorong keterbukaan dan transparansi informasi publik. Untuk mendorong keterbukaan dan transparansi informasi publik, penelitian ini berupaya untuk memperjelas dampak penerapan *e-government*. Sejumlah orang terkait diwawancarai dan informasi diambil dari situs web Pemerintah Kabupaten Klungkung Bali untuk penelitian ini.

Untuk mengisi kesenjangan pengetahuan, metode pengumpulan data meliputi investigasi lapangan dan wawancara. Penelitian deskriptif merupakan pendekatan studi yang digunakan. Berdasarkan temuan yang ada, ada beberapa alasan mengapa *website* ini dibuat, antara lain agar mudah digunakan masyarakat dan mendapat dukungan penuh dari pimpinan daerah. Sementara itu, belum ada instrumen hukum, baik tekstual maupun kontekstual, yang mengatur keberadaan

website, pengelolaan informasi data yang buruk, dan kurangnya tenaga ahli *IT* yang berkontribusi dalam pengelolaan *website*.

Temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi penulis karena penelitian ini fokus pada *e-government* dan keterbukaan informasi publik; Namun penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada transparansi dan keterbukaan informasi, sedangkan penelitian ini hanya membahas keterbukaan informasi publik.

Pemanfaatan *e-government* Untuk Mewujudkan Transparansi Informasi Publik di Kota Batu, oleh Salwa dkk. (2020), merupakan referensi keempat dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Batu dalam menerapkan *E-Government* dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif kota pintar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu menjadi topik utama investigasi ini.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu menjadi tempat pengumpulan data yang menggunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk penelitian. Studi berikut menunjukkan bahwa Among Tani, Among Kota, dan Among Warga merupakan aplikasi *e-government* yang paling efektif di Kota Batu. Selain itu, peraturan dan kebijakan Walikota mendorong penggunaan *e-government*. Namun, kurangnya sumber daya masyarakat dan petugas, serta pelatihan dan sosialisasi kepada warga Kota Batu, khususnya lansia, yang kurang siap menggunakan teknologi digital, menjadi hambatan dalam penerapannya secara penuh.

Penelitian ini relevan karena memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian di atas dalam membahas implementasi *e-government*. Namun, hal ini berbeda dalam dua hal utama: pertama, pembicaraan mengenai transparansi dalam kaitannya dengan Dinas Komunikasi dan Informasi kota; kedua, berbicara tentang keterbukaan informasi dan publik; dan ketiga, menyebut Pemprov DKI Jakarta sebagai objeknya.

Menurut Perwitasari dan Hairunnisa (2021), sumber kelima yang dikutip dalam penelitian ini adalah pemanfaatan *Electronic Government* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai transparansi informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana kehadiran *e-government* telah berkontribusi terhadap terwujudnya transparansi informasi publik. Oknum atau penanggung jawab sekretariat atau dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, serta sejumlah staf dinas tersebut, menjadi subyek pemeriksaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi pengambilan sampel *purposive*. Metode deskripsi kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa inisiatif *e-government* yang bertujuan untuk membuat data publik lebih mudah diakses belum berjalan sesuai rencana. Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi infrastruktur jaringan internet yang sangat bervariasi antar wilayah, sehingga diperlukan proses manual dalam beberapa keterbukaan data publik.

Karena membahas mengenai realisasi keterbukaan informasi publik dan penerapan *e-government*, maka penelitian ini menjadi relevan. Tujuan studi antara kedua proyek tersebut berbeda; yang pertama fokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yang kedua pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Karya penulis Arnus tahun 2017 yang berjudul “Peran *E-Government* Dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara” menjadi sumber keenam yang dikutip dalam penelitian ini. Penelitian ini berupaya untuk memahami reaksi masyarakat terhadap peluncuran sistem *e-government* di Sulawesi Tenggara, kontribusi sistem tersebut terhadap upaya mendorong pemerintahan yang lebih terbuka, dan tantangan yang dihadapi oleh Biro Humas dan PDE, pengelola *e-government* di daerah. Penduduk dan pemerintahan Sulawesi Tenggara menjadi subjek utama penelitian ini.

Deskripsi kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk analisis data. Informasi tersebut dikumpulkan melalui sistem wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat Sultra, seperti media, akademisi, dunia usaha, LSM, serta Biro Humas dan Pengolahan Data Elektronik (PDE) provinsi tersebut. Observasi daring juga dilakukan pemerintah Sultra. Penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki sistem pelayanan *online* dan mengungkapkan seluruh rencana kerja dan penggunaan dana pembangunan dalam *e-government* merupakan salah satu upaya pemerintah Sultra untuk bersikap transparan. Namun, masih banyak informasi yang tidak akurat dan tidak lengkap di situs tersebut. Pasalnya, Biro Humas dan PDE Pemprov Sultra masih menghadapi keterbatasan dalam kemampuannya

dalam mengelola data dan informasi yang akan ditampilkan di situs *e-government* karena keterbatasan anggaran operasional.

Persoalan kajian pemerintah provinsi dan perdebatan mengenai penerapan *e-government* cukup sebanding, itulah sebabnya penelitian ini relevan. Sedangkan perbedaan penelitian diatas fokus pada pembahasan mengenai transparansi dan penelitian yang sedang dilakukan pembahasan mengenai keterbukaan informasi publik.

Referensi nomor tujuh dalam penelitian ini adalah makalah dari Dinas Komunikasi dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul Efektivitas *E-Government* Berbasis *Website* Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Mamoh et al, 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi transparansi informasi publik saat ini, tantangan yang ada dalam penerapan *e-government* berbasis situs web, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Efektivitas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik di Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi subjek penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif berdasarkan wawancara mendalam, pencatatan yang cermat, dan observasi yang cermat untuk menyusun temuannya. Masih banyak faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini. Hal ini mencakup kurangnya sumber daya manusia yang paham *IT*, infrastruktur pengelolaan situs web yang tidak memadai, kurangnya pendidikan tentang

pentingnya situs web, dan mentalitas masyarakat umum yang sudah ketinggalan zaman. Walaupun penekanan studi ini berbeda dengan investigasi keterbukaan informasi yang akan datang, topik yang dibahas secara konseptual sebanding.

Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat menjadi acuan kesembilan dalam penelitian ini yang ditulis oleh Alya dkk (2022). Dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan, keterlibatan, dan hak publik, studi ini akan merinci dan mengevaluasi bagaimana akses informasi publik dapat menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat menjadi pusat kajian ini.

Untuk mengungkap rincian yang lebih bernuansa, peneliti menggunakan strategi penelitian deskriptif berdasarkan metodologi kualitatif. Observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan, peran, dan keterlibatan digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung Barat terhadap transparansi informasi publik kurang efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ada empat cara untuk melihat hal ini dalam mencapai transparansi: dukungan kepemimpinan, prosedur yang ditetapkan, inisiatif pelatihan, dan dialog terbuka dengan semua pihak yang terlibat. Pengabdian pimpinan merupakan satu-satunya komponen yang berfungsi dengan baik; komponen lainnya telah dieksekusi dengan buruk. Praktik keterbukaan informasi publik yang tidak mematuhi SOP

dan peraturan yang berlaku menjadi bukti lebih lanjut kurangnya transparansi dalam organisasi ini.

Relevansi pada penelitian ini yaitu memiliki kesamaan dalam pembahasan keterbukaan informasi publik sehingga bisa memberikan referensi bagi penulis. Sekaligus, objek penelitianlah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi (2022) oleh Fauziyah dkk. merupakan sumber kedelapan yang dikutip dalam penelitian ini. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik Kota Cimahi menjadi fokus penelitian ini. Pemkot Cimahi menjadi pusat penyelidikan ini.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Observasi, wawancara, tinjauan pustaka, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan, kebijakan keterbukaan informasi publik Kota Cimahi belum sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain belum adanya petugas informasi di PPID Pemaux yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi, lambatnya penyusunan daftar dokumen publik karena departemen belum mengeluarkan dokumen tersebut, dan rendahnya edukasi masyarakat mengenai hal tersebut. proses permintaan dokumen publik, yang merupakan permasalahan yang sedang berlangsung. Tidak banyak orang yang menyadari hal ini.

Temuan penelitian ini relevan karena sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik transparansi informasi publik; namun, penekanan dan tujuan penelitian ini membedakannya dengan penelitian-penelitian berikutnya.

Sumber kesebelas yang dikutip dalam penelitian ini adalah Keterbukaan Informasi Publik di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro karya Kusnan (2021: Kajian Keterbukaan Pemerintahan di Tingkat Desa). Upaya Pemerintah Desa Pejambon dalam mengadopsi keterbukaan informasi publik menjadi fokus penelitian ini. Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bojonegoro menjadi pusat penyelidikan ini.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Metode seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian menemukan bahwa transparansi pemerintah Desa Pejambon berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat melalui inisiatif seperti Musrenbang Desa, Diskusi Publik, *SMS Center*, dan Grup *WhatsApp*. Inisiatif yang paling menonjol adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Pejambon, yang dipublikasikan melalui *website* dan papan reklame.

Kajian ini penting karena menambah pembahasan mengenai cara terbaik untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Menyusul penelitian yang mengamati Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah penelitian yang fokus pada pemerintahan desa.

Tata kelola elektronik, keterbukaan, dan transparansi informasi publik di bidang tertentu merupakan topik utama penelitian sebelumnya Rumimpunu et al (2021), Yogiswara et al (2014), Salwa et al (2020), Arnus (2017). Dan pada beberapa penelitian hanya mengkaji terkait penerapan *electronic government* dan keterbukaan informasi pada suatu daerah Indah & Hariyanti (2018), Perwitasari & Hairunnisa (2021), Mamoh et al (2022), Alya et al (2022), Fauziyah et al (2022), Kusnan (2021). Penelitian sebelumnya sebagian besar fokus mempelajari situs resmi suatu daerah, namun penelitian ini mengambil pendekatan baru. Penelitian mengenai pemanfaatan *e-government* untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, khususnya melalui aplikasi Jakarta Kini atau JAKI, hingga saat ini belum ditemukan. Dalam konteks akademis, penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan yang ada di bidang ilmu administrasi negara khususnya Studi Implementasi, *Electronic Government*, dan Persepsi Publik. Penelitian ini mengkaji pemanfaatan *e-government* untuk mencapai transparansi informasi publik di Provinsi DKI Jakarta, dengan fokus pada penyediaan aplikasi Jakarta terkini.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai *electronic government* dan konsep *smart city* khususnya DKI Jakarta.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai masukan untuk terus meningkatkan kualitas program *Smart City* DKI Jakarta dan optimalisasi *electronic government* melalui keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Sebagai informasi dan acuan bagi masyarakat tentang keterbukaan informasi publik melalui *electronic government* di DKI Jakarta

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai dasar penelitian yang dilakukan terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini berisikan teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Uraian teori yang berkaitan dengan Implementasi *Electronic Government* Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta (Studi Kasus Penyediaan Aplikasi Jakarta Kini), serta menguraikan kerangka berpikir dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode atau cara yang digunakan dalam penelitian, Bab ini juga berisikan tentang paardigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang temuan-temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Implementasi *Electronic Government* Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di DKI Jakarta (Studi Kasus Penyediaan Aplikasi Jakarta Kini)”.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang peneliti berikan bagi pemerintah dan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisikan tentang judul-judul buku, artikel jurnal, produk hukum dan alamat website yang digunakan sebagai referensi dalam pengerjaan skripsi